



**LAPORAN KINERJA (LKjIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatNya-lah kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu evaluasi sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk perbaikan kinerja ke depannya.

Batam, Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA BATAM



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar dan Tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3 Struktur Organisasi	5
1.4 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	7
1.5 Permasalahan Umum dan Isu-Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2 Capaian Renstra	22
3.3 Realisasi Anggaran.....	22
BAB IV PENUTUP	27

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	6
---	---

Daftar Tabel

Tabel 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang	7
Tabel 2 Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Batam	8
Tabel 3 Daftar Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	8
Tabel 4 Permasalahan Umum Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.....	10
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	14
Tabel 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Setelah Perubahan APBD.....	15
Tabel 7 Capaian Kinerja Tahun 2019.....	16
Tabel 8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	17
Tabel 9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	18
Tabel 10 Jumlah Aksi Demonstrasi Tahun 2019	19
Tabel 11 Capaian Renstra Tahhun 2016-2021	23
Tabel 12 Sasaran dan Indikator Kinerja Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2016-2021.....	24
Tabel 13 Realisasi Anggaran Tahun 2019	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 3 (tiga) hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota, dan pembinaan PPNS kabupaten/kota. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Secara rinci, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan

mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakatsesuai dengan kewenangannya.Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Satuan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang sumber daya aparatur, bidang perlindungan masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan di bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat; dan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Satuan mempunyai fungsi:

- d. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang sumber daya aparatur, bidang perlindungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
- f. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan di bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Satuan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi Sekretariat, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Sumber Daya Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat, UPT serta Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
- d. membina bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara memberikan *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional ketentraman dan ketertiban dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran peraturan perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
- f. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta rencana kerja lainnya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

- h. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya;
- i. merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;
- m. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Sumber Daya Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat;
- n. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja kepada para Kepala Bidang;
- o. menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;

- p. melaporkan akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- q. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- r. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Sumber Daya Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- t. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.3 Struktur Organisasi

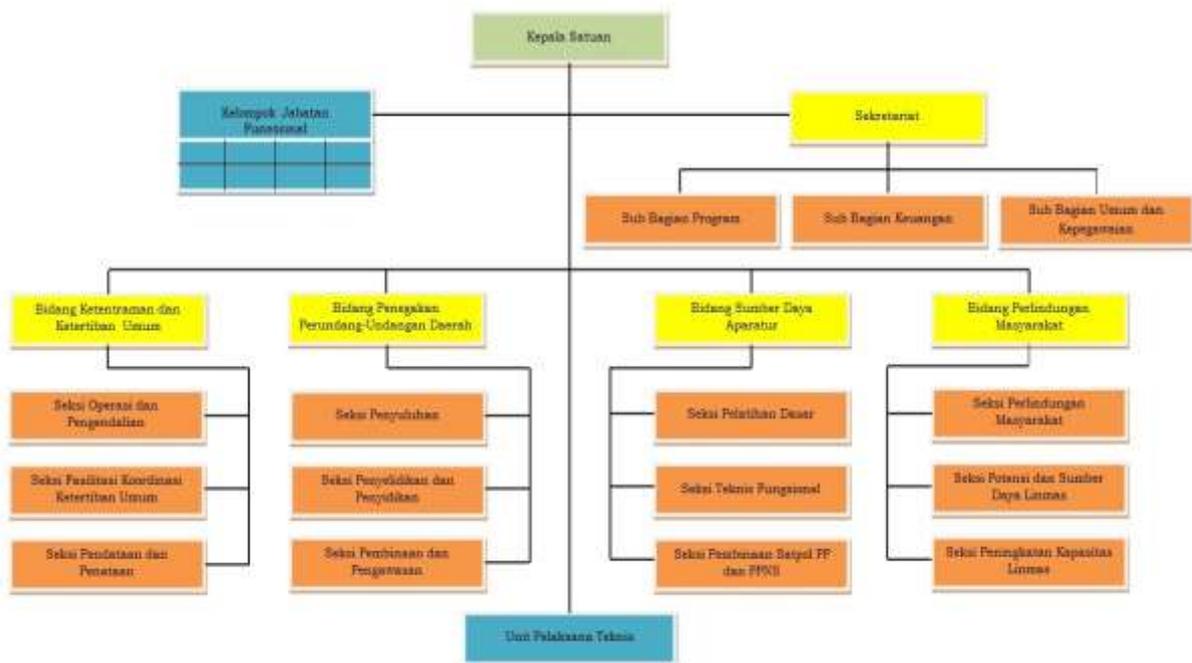
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah sebagai berikut:

Kepala Satuan membawahi;

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penyelidikan dan penyidikan; dan
 - 3) Seksi Pengawasan.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;

- 2) Seksi Fasilitasi Koordinasi Trantibum; dan
 - 3) Seksi Pendataan dan Penataan
- d. Bidang Sumber Daya Aparatur
- 1) Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2) Seksi Teknis Fungsional; dan
 - 3) Pembinaan Satpol PP dan PPNS.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
- 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Seksi Potensi Dan sumber Daya Linmas; dan
 - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Linmas.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam



1.4 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, perangkat daerah membutuh sumber daya baik itu sumber daya manusia/aparatur dan sarana prasarana (aset/modal) yang baik kuantitas maupun kualitasnya dapat menentukan keberhasilan organisasi perangkat daerah.

1.4.1 Sumber Daya Aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam memiliki 677 (enam Ratus tujuh puluh tujuh) orang aparatur yang terdiri dari 222 (dua ratus dua puluh dua) PNS dan 455(empat ratus lima puluh lima) orang Non PNS/Tenaga Kontrak dengan berbagai tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat	Gol/ Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Tk. I	IV/b	1	1	2
2	Pembina	IV/a	4	-	4
3	Penata Tk. I	III/d	17	-	17
4	Penata	III/c	6	1	7
5	Penata Muda Tk. I	III/b	30	1	31
6	Penata Muda	III/a	23	3	26
7	Pengatur Tk.I	II/d	24	-	24
8	Pengatur	II/c	76	1	77
9	Pengatur Muda Tk.I	II/b	19	-	19
10	Pengatur Muda	II/a	9	-	9
11	Juru Tk. I	I/d	2	-	2
12	Juru	I/c	1	-	1
13	Juru Muda Tk. I	I/b	2	-	2
14	Juru Muda	I/a	1	-	1
15	Non PNS/Pegawai Kontrak	-	407	48	455
Jumlah			622	55	677

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Desember 2019)

Tabel 2
Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Batam

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	6	-	6
2	S1	72	4	76
3	Diploma	4	1	5
4	SMA/SMK/Sederajat	122	2	124
5	SMP/Sederajat	5	-	5
6	SD/Sederajat	6	-	6
Jumlah		215	7	222

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Desember 2019)

1.4.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya aparatur, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam juga memiliki sarana dan prasarana (aset/modal) guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dapat dilihat dalam daftar berikut ini:

Tabel 3
Daftar Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Uraian	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Unit
2	Bangunan Gedung Kantor	10 Unit
3	Gedung Pos Jaga	4 Unit
4	Bangunan Lainnya	3 Unit
5	Bus	1 Unit
6	Mini Bus	3 Unit
7	Truck	6 Unit
8	Pick Up	3 Unit
9	Sepeda motor	8 Unit
10	Komputer	23 Unit
11	Printer	15 Unit
12	Scanner	1 Unit
13	Laptop	5 Unit
14	AC	17 Unit
15	Mesin Penghancur Kertas	3 Unit
16	Meja Eselon	20 Unit
17	Meja Staf	20 Unit
18	Kursi Eselon	20 Unit
19	Lemari Arsip	10 Unit
20	Filling Cabinet	20 Unit
21	Handy Talky	10 Unit
22	Pistol	5 Unit
23	Perisai/Tameng	150 Unit

1.5 Permasalahan Umum dan Isu-Isu Strategis

1.5.1 Permasalahan Umum

Sejak pertama kali dikembangkan menjadi kota industri, perdagangan, jasa dan alih kapal pada awal tahun 1970an, Kota Batam telah mengalami banyak kemajuan. Pengembangan Kota Batam oleh Pemerintah Pusat tak terlepas dari letak Kota Batam yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga dan daerah-daerah yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional, hal ini tentu berimplikasi positif pada posisi geostrategik Kota Batam. Dalam perspektif ekonomi, wilayah Kota Batam menjadi daya tarik bagi negara tetangga untuk berinvestasi dan merelokasi aktivitas ekonomi mereka ke Batam, mulai dari aktivitas industri, perdagangan maupun jasa.

Pengembangan dan kemajuan Kota Batam juga menjadi daya tarik bagi pendatang dari berbagai daerah sehingga menjadikan kota ini kota yang heterogen dengan multikultur dan menjadi miniatur Indonesia karena hampir semua etnis dan agama terdapat di kota ini yang berdampak kepada meningkatnya jumlah penduduk.

Kondisi ini selain berdampak positif yaitu menambah khasanah kekayaan budaya juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Jumlah penduduk yang banyak dan heterogen sangat rawan menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mengidentifikasi beberapa permasalahan umum Kota Batam terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Beberapa permasalahan Kota Batam yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Permasalahan Umum yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih tingginya pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3)	Penegakan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum masih kurang	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum 2. Pemahaman aparaturnya terhadap tugas pokok dan fungsi Satpol PP masih kurang
2	Masih tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah	Penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah masih kurang	1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Perda / Perkada terkait ketentraman dan ketertiban umum 2. Pemahaman aparaturnya terhadap tugas pokok dan fungsi Satpol PP masih kurang
3	Gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat tinggi	Penerapan sistem keamanan lingkungan masih kurang	Jumlah Linmas masih sedikit dan kurang diberdayakan
4	Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	Sarana dan prasarana masih terbatas	Alokasi anggaran masih kurang

1.5.2 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 adalah:

- a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan fokus pada isu 1) menghadirkan *Clean Government*, 2) meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas aparatur pemerintahan, dan 3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan;
- b. Peningkatan kualitas, pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah, dengan fokus pada isu 1) penanganan ruas jalan strategis nasional dan provinsi, jalan-jalan di kawasan pemukiman maupun ruas jalan non status yang mempunyai nilai strategis dan ekonomi, 2) penanganan perumahan kumuh, penyediaan rumah murah dan Rusun, serta Peningkatan sarana dan prasarana utilitas kawasan pemukiman, 3) penyediaan transportasi massal darat dan laut yang murah dan representatif guna meningkatkan aksesibilitas antar wilayah perkotaan dan hinterland, 4) penanggulangan banjir.
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat yang Berdaya Saing, dengan fokus pada isu 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan, 2) meningkatkan kualitas pelayanan dan jangkauan Kesehatan masyarakat, 3) pengentasan dan pemberdayaan masyarakat miskin, 4) meningkatkan pemberdayaan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial,
- d. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan fokus pada isu 1) pemenuhan standar ruang terbuka hijau, 2) pengelolaan persampahan, 3) pengelolaan sumberdaya air, 4) pengelolaan limbah secara terpadu, 5) pengurangan efek rumah kaca, 6) penanggulangan potensi resiko kekeringan.
- e. Pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, dengan fokus pada isu 1) kualitas dan daya saing tenaga kerja, 2) kualitas transportasi publik untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dalam melakukan tindakan ekonomi, 3)

akses permodalan, kualitas produk dan akses pemasaran produk UMKM.

- f. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan fokus pada isu 1) pengembangan konsep Kota Pintar (Smart city), 2) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, 3) meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan.
- g. Peningkatan kualitas produk kepariwisataan (jasa dan perdagangan sebagai unggulan Kota Batam), dengan fokus pada isu 1) ekowisata bahari, 2) pusat wisata kuliner, 3) wisata historis dan budaya, 4) investasi pariwisata, 5) promosi pariwisata.

Dari beberapa isu strategis Kota Batam tersebut, yang relevan dan penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam penyelenggaraan layanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah:

- a. reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan dengan efektif dan efisien, karena tingginya tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap kinerja (*performance*) dan kualitas pelayanan (kejelasan prosedur, waktu, biaya, sarana dan prasarana serta kompetensi aparatur). Hal ini merupakan tantangan besar di masa yang akan datang.
- b. Penertiban pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum terutama yang berada di daerah milik jalan guna mendukung pembangunan infrastruktur khususnya jalan yang bernilai strategis dan ekonomi;
- c. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang masih harus terus ditingkatkan;
- d. Peningkatan sistem keamanan lingkungan guna menghadapi gangguan keamanan di lingkungan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2016-2021. Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Renja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan berkualitas	1. Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 2. Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100% 100%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Jumlah aksi demo yang diamankan 2. Jumlah Linmas yang diberdayakan	25 kali 80 orang

Akan tetapi, pada perubahan APBD Tahun 2019, Pemerintah Kota Batam mengalami defisit anggaran sehingga dilakukan rasionalisasi anggaran pada setiap OPD, termasuk Satpol PP, sehingga mempengaruhi target capaian kinerja tahun 2019. Akibat rasionalisasi anggaran tersebut, target kinerja pembinaan Linmas semula dianggarkan untuk 80 orang tidak dapat dilaksanakan. Berikut Perjanjian Kinerja setelah Perubahan APBD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Setelah Perubahan APBD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan berkualitas	2. Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%
		2. Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	3. Jumlah aksi demo yang diamankan	25 kali

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 disajikan berikut ini:

Tabel 7
Capaian Kinerja Tahun 2019

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan berkualitas	1. Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%
		2. Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Jumlah aksi demo yang diamankan	25 kali	30 kali	120%
		2. Jumlah Linmas yang diberdayakan	80 orang	0 orang	0%

3.1.1 Analisis Capaian Sasaran Strategis 1:

“Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan berkualitas”.

Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah 1) Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dan 2) Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sasaran ini

dicapai melalui dua program dan kegiatan, yaitu Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kedua program tersebut untuk memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran dan sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dengan masing-masing capaian sebesar 100%

Berikut ini adalah capaian kinerja sasaran strategis 1:

Tabel 8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan berkualitas	1. Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja tahun 2019 ini sama dengan capaian tahun 2018, yaitu 100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam baik.

3.1.2 Analisis Capaian Sasaran Strategis 2:

“Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban”.

Untuk mencapai sasaran strategis ini Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Batam melaksanakan 1 (satu) program yaitu program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat dan 5 (lima) kegiatan yaitu: 1) Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah; 2) Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam; 3) Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan; 4) Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam; 5) Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 9
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	2019			2018		
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)	Target (7)	Realisasi (8)	Capaian (9)
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Jumlah aksi demo yang diamankan	25 kali	30 kali	120%	25 kali	25 kali	100%
		2. Jumlah Linmas yang diberdayakan	80 orang	-	0 %	150 orang	150 orang	100 %

a. Jumlah aksi demo yang diamankan

Selama tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam telah melakukan pengamanan terhadap aksi-aksi demonstrasi dan kegiatan-kegiatan lain di lokasi objek vital dan tempat-tempat strategis Pemerintah Kota Batam sebanyak 30 kali, dengan melibatkan instansi selain Pemerintah Kota Batam antara lain TNI dan Polri.

Dengan pengamanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan aparat keamanan lainnya, aksi-aksi demonstrasi selama tahun 2019 dapat dikendalikan sehingga tidak timbul tindakan anarkis dari demonstran.

Berikut daftar pengamanan aksi demonstrasi dan kegiatan-kegiatan di lokasi objek vital dan tempat strategis Pemerintah Kota Batam:

Tabel 10
Jumlah Aksi Demonstrasi Tahun 2019

No	Tanggal	Uraian	Tempat	Ket	Jam	Masa
1	25 Januari 2019	Demo Aksi Buruh	Graha Kepri	FSPMI	06.00 Wib s/d 18.00	±750 Orang
2	12 Februari 2019	Demo Mahasiswa	Kantor Walikota Batam dan Kejari	Aliansi Mahasiswa Kota Batam	09.00 Wib s/d selesai	±30 Orang
3	06 Februari 2019	Demo Aksi Buruh	Kantor Walikota Batam	FSPMI	10.00 Wib s/d selesai	±950 Orang
4	07 Februari 2019	Demo Mahasiswa	Kantor Walikota Batam	Mahasiswa Pemuda Kepri PMII	10.00 Wib s/d selesai	±185 Orang
5	11 Februari 2019	Demo Forun Travel/ Pariwisata Kepri	DPRD	Forun Travel/ Pariwisata Kepri	08.00 Wib s/d selesai	±250 Orang
6	13 Februari 2019	Demo Aksi Buruh	Graham Kepri	FSPMI	10.00 Wib s/d selesai	±2000 Orang
7	18 Februari 2019	Demo K-2	Kantor Pemerintah Kota Batam	Guru	14.00 Wib s/d selesai	± 100 Orang
8	19 Februari 2019	Demo Mahasiswa	Kantor Pemko dan DPRD Kota Batam	Aliansi Mahasiswa Kota Batam	10.00 Wib s/d selesai	±150 Orang
9	06 Maret 2019	Demo Mahasiswa	Kantor Pemko dan DPRD Kota Batam	Aliansi Mahasiswa Kota Batam	08.00 Wib s/d selesai	±150 Orang
10	18 Maret 2019	Demo Aksi Buruh	Graham Kepri	Demo Aliansi SP/SB	10.00 Wib s/d selesai	±100 Orang

No	Tanggal	Uraian	Tempat	Ket	Jam	Masa
				Batam		
11	01 Mei 2018	Buruh May Day	Kantor Walikota Batam dan Graha Kepri	FSPMI	10.00 Wib s/d selesai	±200 Orang
12	04 Juli 2019	Demo Warga	Kantor BP Batam dan DPRD	Wrag Bukit Lestari Mangsang Kec. Sei Beduk	09.00 Wib s/d selesai	±100 Orang
13	17 Juli 2019	Demo Mahasiswa	BP Batam	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	09.00 Wib s/d selesai	±50 Orang
14	06 Agustus 2019	Demo Mahasiwa	DPRD BATAM	Aliansi mahasiswa dan Pemuda Kota Batam (Ibnu Sina Batam)	09.00 Wib s/d selesai	±50 Orang
15	12 Agustus 2019	Demo Buruh	PEMKO BATAM	KC FSPMI	16.00 wib s/d Selesai	±150 Orang
16	21 Agustus 2019	Demo Buruh	PEMKO BATAM dan DPRD	LEM SPSI	08.00 Wib s/d selesai	±1000 Orang
17	27 Agustus 2019	Demo Buruh	PEMKO BATAM dan DPRD	LEM FPBI	08.00 Wib s/d selesai	±250 Orang
18	04 September 2019	Demo Mahsiswa	Kantor DPRD Kota Batam	GMNI	08.00 Wib s/d selesai	±30 Orang
19	04 September 2019	Demo Dukung Papua Tetap NKRI	KANTOR PEMKO	PMII	10.00 Wib s/d selesai	±50 Orang

No	Tanggal	Uraian	Tempat	Ket	Jam	Masa
20	19 September 2019	LSM Tolak Revisi UU KPK	KANTOR DPRD dan PEMKO	Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah Kepri	08.00 Wib s/d selesai	±50 Orang
21	23 September 2019	Demo Mahasiswa Menolak RUU KPK	DPRD KOTA BATAM	BEM POLITEKNIK BATAM	08.00 Wib s/d selesai	±150 Orang
22	24 september 2019	Demo Warga Mendukung Revisi UU KPK	DPRD KOTA BATAM	Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah Kepri	09.00 Wib s/d selesai	±200 Orang
23	30 september 2019	Demo Mahasiswa	DPRD KOTA BATAM	IBNUSINA dan UNRIKA	09.00 Wib s/d selesai	±500 Orang
24	02 Oktober 2019	Demo Buruh Tolak Kenaikan BPJS	PEMKO BATAM	FSPMI dan GOJEK	10.00 Wib s/d selesai	±700 Orang
25	04 Oktober 2019	Demo Mahasiswa Menuntut Walikota tidak Merangkap Jabatan sebagai Ketua BP	PEMKO BATAM	HMI	08.00 Wib s/d selesai	±50 Orang
26.	17 Oktober 2019	Demo Mahasiswa	KANTOR DPRD dan PEMKO	UNRIKA	08.00 Wib s/d selesai	±200 Orang
27.	21 Oktober 2019	Demo Mahasiswa	KANTOR DPRD dan PEMKO	ALIANSI MAHASISWA dan PEMUDA KOTA BATAM	08.00 Wib	±50 Orang

No	Tanggal	Uraian	Tempat	Ket	Jam	Masa
28.	7 November 2019	Demo Pedagang Pasar Induk	KANTOR DPRD dan PEMKO	ASOSIASI PEDAGANG KAKI LIMA/LSM GERBAK	08.00 Wib	±50 Orang
29.	21 November 2019	Demo Pedagang Pasar Induk	KANTOR DPRD dan PEMKO	ASOSIASI PEDAGANG KAKI LIMA/LSM GERBAK	08.00 Wib	±50 Orang
30.	02 Desember 2019	Demo Pedagang Pasar Induk	DPRD KOTA BATAM	ASOSIASI PEDAGANG KAKI LIMA (APKLI)	08.00 Wib	±100 Orang

Capaian kinerja tahun 2019 ini lebih tinggi dibanding tahun 2018 yaitu sebanyak 30 kali dengan tingkat capaian 120 %.

b. Jumlah Linmas yang diberdayakan

Selama tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tidak ada pembinaan Satlinmas akibat rasionalisasi anggaran sebagai akibat difisit APBD tingkat Kota Batam. Namun demikian pemberdayaan Linmas tidak berhenti, akan tetapi sekaligus dilakukan melalui kegiatan Pembinaan Satlinmas Pemilu dengan pembekalan pengamanan di TPS terkait Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia. Jumlah Linmas yang terlibat untuk mengamankan TPS sebanyak 5914 orang, di mana setiap TPS diamankan oleh 2 orang Linmas. Banyaknya jumlah Linmas yang diberdayakan memang tergantung kepada kemampuan anggaran Pemerintah Kota Batam.

3.2 Capaian Renstra

Setelah membahas realisasi dan capaian kinerja, berikut ini akan dibahas realisasi dan capaian kinerja rencana menengah Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Batam sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021.

Tabel 11
Capaian Renstra Tahun 2016-2021

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target				Realisasi			
			2016 (4)	2017 (5)	2018 (6)	2019 (7)	2016 (8)	2017 (9)	2018 (10)	2019 (11)
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan berkualitas	1. Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %
		2. Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Jumlah aksi demo yang diamankan	50 kali	50 kali	50 kali	50 Kali	25 kali	25 kali	25 kali	30 kali
		2. Jumlah Linmas yang diberdayakan	344ora ng	344ora ng	344ora ng	344ora ng	60 orang	80 orang	150 orang	0

Dari tabel di atas, dapat dilihat target Renstra untuk sasaran strategis 1 telah terealisasi, sedangkan untuk Sasaran Strategis 2 dengan indikator kinerja **“jumlah aksi demo yang diamankan”**, realisasinya 60%. Tidak banyaknya aksi-aksi demonstrasi dapat menggambarkan bahwa kondisi umum ketentraman dan ketertiban Kota Batam cukup baik, sedangkan untuk indikator kinerja **“jumlah Linmas yang diberdayakan”** capaian kinerjanya tidak sesuai target. Hal ini disebabkan karena dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Kota Batam mengalami defisit anggaran sehingga anggaran lebih diprioritaskan untuk pembangunan Infrastruktur.

3.3 Perubahan Renstra

Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sedang menyusun Perubahan Renstra Tahun 2016-2021. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 ini dilakukan guna menyesuaikan dengan perubahan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021. Perubahan RPJMD Kota Batam tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN-RB). Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa misi RPJMD Kota Batam, beberapa rumusan tujuan, sasaran, indikator sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana tercantum dalam BAB V RPJMD Kota Batam kurang sesuai. Selain itu, indikator kinerja RPJMD Kota Batam 2016-2021 masih menunjukkan indikator kinerja yang berorientasi output, sedangkan bagi instansi pemerintah setingkat Kota indikator yang wajib ditampilkan adalah indikator kinerja yang berorientasi outcome.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja pada Perubahan Renstra tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Sasaran dan Indikator Kinerja Perubahan Renstra Satpol PP Kota
Batam Tahun 2016-2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Survei kepuasan masyarakat
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	4. Persentase penurunan pelanggaran K3	Jumlah pelanggaran k3 yang teridentifikasi tahun (n-1) - tahun (n) / jumlah pelanggaran k3 yang teridentifikasi tahun (n-1) x 100

		5. Persentase penurunan pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran perda tahun (n-1) - tahun (n)/jumlah pelanggaran perda tahun (n-1) x 100
--	--	---	---

Dengan Perubahan Renstra ini, maka indikator kinerja yang ditetapkan telah menunjukkan indikator kinerja yang berorientasi hasil (outcome), dan akan digunakan pada untuk mengukur kinerja pada tahun-tahun berikutnya sampai periode Renstra berakhir.

3.4 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 19.877.452.531,00 (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 19.544.077.267,00 (sembilan belas milyar lima ratus empat puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah)). Persentase realisasi tersebut sebesar **98.32%**.

Realisasi anggaran tahun 2019 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13
Realisasi Anggaran Tahun 2019

	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
1	Program Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran			
	1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	18.261.281.771,68	18.076.877.767,00	99,86
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	325.979.820	294.673.500,00	90.40
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat			

Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Persentase
1)	Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah	319.240.000,00	229.425.000,00	63,58
2)	Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	79.230.000,00	55.680.000,00	70,28
3)	Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam	338.750.000,00	338.750.000,00	100,00
4)	Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan	193.600.000,00	193.600.000,00	100,00
5)	Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas	6.600.000,00	2.310.000,00	35,00
6)	Peningkatan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden	352.771.000,00	352.760.000,00	99,99

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja adalah sebuah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Batam yang merupakan bagian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam telah menunjukkan kinerja yang baik meskipun masih terdapat berbagai kekurangan dalam pencapaiannya. Oleh karena itu perbaikan sangat diperlukan dan merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja pada khususnya, dan bagi *stakeholders* Pemerintah di Kota Batam pada umumnya.